

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH,
PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN DAERAH
(Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Salatiga)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun oleh :
Zulia Ariyani
NIM 14.0102.0122

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH,
PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN DAERAH**
(Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Salatiga)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun Oleh:
Zulia Ariyani
NIM : 14.0102.0122

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Zulia Ariyani

NPM 14.0102.0122

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal **15 Agustus 2018**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Muji Mranani, S.E., M.Si., Ak., CA.

Pembimbing I

Faqiatul Mariya Waharini, S.E., M.Si.

Pembimbing II

Tim Penguji

Nur Naila Yuliani, S.E., M.Sc.

Ketua

Veni Soraya Dewi, S.E., M.Si.

Sekretaris

Faqiatul Mariya Waharini, S.E., M.Si.

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal

12 SEP 2018

Dra. Marlisa Kurnia, MM

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulia Ariyani
NIM : 14.0102.0122
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, PENERAPAN SISTEM
INFORMASI AKUNTANSI DAN PENERAPAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
DAERAH**

(Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Salatiga)

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 15 Agustus 2018

Pembuat Pernyataan,



Zulia Ariyani

NIM 14.0102.0122

RIWAYAT HIDUP

Nama : Zulia Ariyani
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Citrosono RT 003/RW 002, Kec. Grabag, Kab. Magelang
Alamat Email : Juliaariyani2121@gmail.com

Pendidikan Formal:

TK (2000-2001) : TK AB AL- ITTIHAD Citrosono, Kec. Grabag
SD (2001-2006) : MI AL- ITTIHAD Citrosono, Kec Grabag
SMP (2006-2009) : MTs Negeri Grabag
SMA (2009-2013) : SMK Negeri 3 Kota Magelang
Perguruan Tinggi (2014-2018) : S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang

Magelang, 15 Agustus 2018

Peneliti



Zulia Ariyani

NPM. 14.0102.0122

MOTTO

*“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga”
(H.R. Muslim)*

*“Keberhasilan hidup sangat bergantung dari mental yang kuat dan cara pandang kita terhadap pekerjaan yang kita lakukan”
(Kata Bijak)*

*“Rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan, kehilangan, dan kekecewaan. Tetapi kalau kita sabar, kita akan segera melihat bentuk lainnya”.
(Joseph Addison)*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Pemerintah Akuntansi, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Salatiga)"**

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Muji Mranani, S.E., M.Si., Akt selaku dosen pembimbing 1 (satu) yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini
2. Ibu Faqiatul Mariya W, SE, M.Si selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang juga telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
3. Ibu Nur Laila Yuliani, SE, M.Sc selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang dan Selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
4. Ibu Veni Soraya Dewi, SE, M.Si selaku dosen penguji 2 (dua) yang juga banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
5. Kepada keluarga saya ibu, bapak, kakek dan nenek saya yang selalu memberikan do'a, dukungan dan perhatian baik moril maupun materiil untuk saya.

Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan kepada penyusun. Harapan dari penyusun semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Magelang, 15 Agustus 2018

Peneliti



Zulha Ariyani

NIM. 14.0102.0122

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Motto.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Lampiran	x
Abstrak.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	
A. Telaah Teori.....	11
1. Teori <i>Stewardship</i>	11
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia	13
3. Standar Akuntansi Pemerintah	15
4. Sistem Informasi Akuntansi	17
5. Sistem Pengendalian Internal	18
6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	20
B. Telaah Penelitian Terdahulu	25
C. Perumusan Hipotesis	26
D. Model Penelitian	33
BAB III METODA PENELITIAN	
A. Populasi dan Sampel.....	34
B. Data Penelitian.....	35
C. Variabel dan Pengukuran Variabel	36
D. Metoda Analisis Data	38
E. Pengujian Hipotesis	41
1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	41
2. Uji F	42
3. Uji t	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Sampel Penelitian.....	44
B. Statistik Deskriptif Responden.....	44
C. Deskriptif Variabel Penelitian.....	46
D. Uji Kualitas Data.....	48

1. Uji Validitas	48
2. Uji Reliabilitas.....	49
E. Analisis Regresi Linier Berganda	50
F. Uji Hipotesis	51
1.Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	51
2. Uji F	52
3. Uji t	52
G. Pembahasan.....	54

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	60
B. Keterbatasan Penelitian.....	61
C. Saran	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Opini LKPD 2006-2017 Kota Salatiga	3
Tabel 2.1 Telaah Penelitian Sebelumnya	25
Tabel 3.1 Definisi dan Pengukuran variabel	36
Tabel 4.1 Sampel penelitian	44
Tabel 4.2 Profil Responden	45
Tabel 4.3 Statistik deskriptif	46
Tabel 4.4 <i>Cross loading</i>	48
Tabel 4.5 Hasil uji reliabilitas	49
Tabel 4.6 Hasil uji analisis linier berganda	50
Tabel 4.7 Hasil uji R^2	50
Tabel 4.8 Hasil uji F	51
Tabel 4.9 Hasil uji t	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	33
Gambar 3.1 Penerimaan uji F.....	42
Gambar 3.2 Penerimaan uji t	43
Gambar 4.1 Hasil penerimaan uji F	52
Gambar 4.2 Uji t variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	53
Gambar 4.3 Uji t variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	53
Gambar 4.4 Uji t variabel Penerapan Sistem Informasi Akuntansi	54
Gambar 4.5 Uji t variabel Penerapan Sistem Pengendalian internal	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.Kuesioner.....	67
Lampiran 2.Penyebaran Kuesioner	78
Lampiran 3.Tabulasi Data Mentah.....	79
Lampiran 4 <i>Output</i> SPSS Statistik Deskriptif.....	89
Lampiran 5 <i>Output</i> SPSS Uji Validitas.....	90
Lampiran 6 Hasil <i>Cross Loading</i>	100
Lampiran7 <i>Output</i> SPSS Uji Reliabilitas.....	102
Lampiran8 <i>Output</i> SPSS Hasil Regresi.....	104
Lampiran 9 Surat Permohonan Ijin Riset.....	105
Lampiran 10 Rekomendasi Ijin Penelitian dari Kesbagpol.....	107
Lampiran 11 Bukti Penyebaran Kuesioner	108

ABSTRAK

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, PENERAPAN SISTEM
INFORMASI AKUNTANSI DAN PENERAPAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
DAERAH
(Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Salatiga)**

**Oleh:
Zulia Ariyani**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem informasi akuntansi dan penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah (studi pada organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Salatiga). Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi sektor publik yang sering diidentikkan dengan pemerintahan atau badan usaha yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, keamanan, kebebasan beragama dan beberapa hal lainnya. Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah selama suatu periode. Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas laporan keuangan harus memenuhi kriteria yang memadai yaitu memiliki relevansi, dapat diandalkan, dapat dinilai atau dibandingkan, dan dapat dipahami. Peraturan Pemerintah

nomor 71 tahun 2010 menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terdiri atas 7 (tujuh) komponen, yaitu: neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Pada 2 tahun terakhir Pemerintah Kota Salatiga meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemerintah daerah setelah 10 tahun Pemkot Salatiga memperoleh wajar dengan pengecualian (WDP).

Tabel 1.1
Opini LKPD tahun 2006-2017

Tahun	Opini
2006	WDP
2007	WDP
2008	WDP
2009	WDP
2010	WDP
2011	WDP
2012	WDP
2013	WDP
2014	WDP
2015	WDP
2016	WTP
2017	WTP

Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2018 (www.bpk.go.id)

Sejak tahun 2006-2015 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kota Salatiga memperoleh predikat opini WDP akan tetapi pada tahun 2016 Kota Salatiga mampu meningkatkan opini WDP menjadi WTP. Pada tahun 2017 Pemkot Salatiga mampu mempertahankan opini WTP yang telah diperoleh tahun sebelumnya. Artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Melihat semakin meningkatkan kondisi kinerja Kota Salatiga, untuk mempelajari lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang mungkin mempengaruhi pencapaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga. Hasil penelitian ini dapat dijadikan contoh dan panduan bagi kota/kabupaten lain yang masih belum mencapai opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas LKPD.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan di Pemkot Salatiga telah memenuhi kualitas laporan

keuangan pemerintah seperti yang disebutkan dalam karakteristik kualitatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemkot Salatiga mampu mempertahankan kualitas laporan keuangan dari tahun sebelumnya. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif yang memenuhi kualitas laporan keuangan diantaranya informasi yang termuat di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu, bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya, dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna.

Faktor pendukung untuk kualitas laporan keuangan adalah dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Amran (2009) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu instansi. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya akan mampu mempengaruhi kualitas informasi akuntansi pada pelaporan keuangan.

Faktor pendukung untuk kualitas laporan keuangan adalah Standar Akuntansi Pemerintah, Standar akuntansi sangat penting sebagai pedoman untuk pembuat laporan keuangan dan sebagai salah satu mekanisme pengendalian. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas informasi keuangan serta menyulitkan dalam pengendalian Mardiasmo (2009).

Faktor pendukung untuk kualitas laporan keuangan adalah Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan pembuatan laporan keuangan.

Faktor pendukung untuk kualitas laporan keuangan adalah Penerapan Sistem Pengendalian Internal, pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, tujuan pengendalian internal berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi.

Kesenjangan penelitian yang diperoleh penelitian adalah berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian lainnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tawaqal & Suparno (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan

kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian yang di dapatkan bahwa terdapat pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Moha, et al., (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian intern dan prinsip pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian yang di dapatkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan Andini & Yusrawati (2015) Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian yang di dapatkan bahwa terdapat pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan Putra, et al., (2017) Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian yang di dapatkan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan Mahardini & Miranti (2018) dampak penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian yang di dapatkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian yang dilakukan

Darwanis & Mahyani (2015) pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hasil penelitian yang di dapatkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan perkembangan dari penelitian Mahardini & Miranti (2018) dengan persamaan penelitian menguji kembali dampak penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan pemerintah. Perbedaan penelitian **pertama**, menambahkan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal (Tawaqal & Suparno, 2017). Alasan penambahan variabel sistem informasi akuntansi karena sistem informasi akuntansi digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan sebagai bagian dari sistem informasi manajemen pemerintah daerah. Alasan penambahan sistem pengendalian internal karena sistem pengendalian internal dalam pemerintah daerah harus berjalan dengan baik maka, semua operasi, sumber daya, data akan terkendali, tujuan tercapai, dan dapat meminimalisir kesalahan sehingga pemerintah daerah pada OPD dapat menghasilkan informasi akuntansi yang baik dan berdampak pada laporan keuangan yang disajikan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kedua, terkait masalah objek penelitian untuk memperoleh bukti konsistensi hasil penelitian sebelumnya. Sampel penelitian ini di OPD Pemerintah Kota Salatiga. Alasannya karena Kota Salatiga meraih predikat kualitas laporan keuangan daerah yang baik dan OPD Kota Salatiga mampu mempertahankannya.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sumberdaya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk membuktikan bukti empiris pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk membuktikan bukti empiris pengaruh sistem informasi akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Untuk membuktikan bukti empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Kontribusi Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang mempunyai nilai dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi kantor pemerintah daerah yang ada di Kota Salatiga dan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai pengaruh kompetensi sumberdaya manusia, standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi alasan memilih judul penelitian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berisi teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok-pokok masalah dalam penelitian berupa telaah teori, hasil penelitian terdahulu, hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik perhatian karena dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan program SPSS berupa analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas data, analisis regresi dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori Stewardship (*Stewardship theory*)

Stewardship theory Donaldson dan Davis (1991) menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Asumsi filosofi mengenai teori *stewardship* dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya.

Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas *principals* dan manajemen. Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya. Fajar (2012) *Stewardship theory* memandang bahwa manajemen organisasi sebagai *steawards* atau pelayanan. Pemerintah daerah sebagai *stewards*, penerima amanah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah.

LKPD merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pembuatan

LKPD, Pemerintah Daerah harus mengungkapkan secara jelas dan rinci terkait data akuntansi dan informasi-informasi lainnya secara relevan. LKPD yang dibuat oleh Pemerintah Daerah akan bermanfaat bagi berbagai kalangan pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Pihak-pihak tertentu dapat memanfaatkan LKPD tersebut untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi.

Pada awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai alat penggerak akuntansi serta diikuti dengan perubahan yang semakin kompleks, adanya spesialisasi dalam akuntansi serta perkembangannya dalam organisasi sektor publik, selaku *principals* sangat sulit untuk melakukan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan sangat jelas. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pertanggungjawaban atas pengelolaan kekayaan Negara, peran akuntansi sangat diperlukan.

Secara prinsip akuntansi merupakan alat pengendalian diri, sebagai sarana pelaporan aktivitas manajer atas pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. Dengan adanya keterbatasan, pemilik sumber daya menyerahkan amanah pengelolaan sumber daya kepada pihak lain (*stewards*) yang lebih siap. Kontrak hubungan antara *principals* dengan *stewards* didasari dengan kepercayaan, kolektif sesuai dengan tujuan

organisasi. *Stewardship theory* merupakan model yang dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

2. Kompetensi Sumberdaya Manusia

Kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu Moeheriono (2009). Seseorang yang memiliki kompetensi akan bekerja dengan pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, intuitif dan dengan pengalamannya bisa meminimalisir kesalahan. Menurut Spencer (1993) kompetensi adalah suatu yang mendasari karakteristik dari suatu individu yang dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan. Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan),

atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Menurut Alimbudiono & Fidelis (2004) untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Untuk mencapai kompetensi tertentu, seseorang perlu memiliki sejumlah kapabilitas. Kapabilitas biasanya merupakan kombinasi dari dimensi sifat pribadi, ketrampilan dan pengetahuan. Menurut Thoha (1996) ada 5 tipe karakteristik dasar dari kompetensi yaitu :

- a. Motif (*Motive*) yaitu sesuatu yang secara terus menerus dipikirkan atau diinginkan oleh seseorang yang menyebabkan adanya tindakan. Motif ini menggerakkan, mengarahkan dan memiliki perilaku terhadap tindakan tertentu atau tujuan dan perbedaan orang lain.
- b. Sifat (*Trait*) yaitu karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi dan informasi.
- c. Konsep pribadi (*Self Concept*) yaitu pelaku, nilai – nilai dan kesan pribadi seseorang.

- d. Pengetahuan (*Knowledge*) yaitu informasi mengenai seseorang yang memiliki bidang substansi tertentu.
- e. Keterampilan (*Skill*) yaitu kemampuan untuk melakukan tugas fisik dan mental tertentu.

3. Standar Akuntansi Pemerintah

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Standar akuntansi sangat penting sebagai pedoman untuk pembuat laporan keuangan dan sebagai salah satu mekanisme pengendalian. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas informasi keuangan serta menyulitkan dalam pengendalian Mardiasmo (2009). Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Dalam Ketentuan Penutup Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Penerapan SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor

71 Tahun 2010 pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI menjadi penerapan SAP Berbasis AkruaI. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akruaI dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akruaI untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun yaitu pada Tahun 2015. SAP Basis kas adalah SAP yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

4. Sistem Informasi Akuntansi

Akuntansi dan sistem informasi akuntansi bertitik tolak dari suatu landasan yang terdiri dari berbagai konsep, yaitu konsep mengenai akuntansi itu sendiri, konsep sistem, konsep informasi, konsep organisasi dan konsep pengambilan keputusan (Nunuy, 2009). Akuntansi merupakan fungsi pelayanan yang bertujuan untuk menyediakan

pengguna informasi kuantitatif, di sisi lain SIA dirancang untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, melaporkan data dan informasi. SIA dapat berupa sistem manual atau sistem komputerisasi menggunakan komputer (Mahdi et. al 2010).

Definisi sistem informasi akuntansi menurut Susanto (2004:124) dapat didefinisikan sebagai kumpulan subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Krismiaji (2010:4) sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi, dalam (Bodnar dan Hopwood, 2006:24). Informasi yang dihasilkan melalui sistem informasi akuntansi kemudian dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berperan sebagai pengambil keputusan dalam suatu organisasi.

5. Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk

mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menjelaskan sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi. Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Pengendalian internal akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.
- 2) Pengendalian administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja, sehingga menjamin tercapainya tujuan organisasi dan mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan. Adapun prosedur pengendalian tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Personel yang kompeten
- b. Pelimpahan tanggung jawab
- c. Pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait
- d. Pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset dan operasional.

6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu. Istilah “Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengakui laporannya tersebut akan diakui sebagai bagian dari laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi

tujuannya, Standar Akuntansi Pemerintahan (2010:245). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dihasilkan dari dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut SAK (2009). Menurut Standar Akuntansi Keuangan

yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 2009, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Huang et al., (1999) menyatakan bahwa informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni:

a. Relevan

Informasi dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut:

1. Manfaat umpan balik (*feedback value*).

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

2. Manfaat prediktif (*predictive value*).

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3. Tepat waktu (*timeliness*).

Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4. Lengkap

Informasi akuntansi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang

disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila:

1. Dapat diuji kebenarannya (*verifiable*)

Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir yang sama.

2. Netral

Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan. informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Penyajian secara wajar/ jujur (*representational faithfulness*)

Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. Informasi yang disajikan harus bebas dari unsur bias.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel. 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penelitian dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Tawaqal Suparno, (2017)	& Sistem informasi akuntansi Sistem pengendalian internal Kompetensi sumber daya manusia	pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
2	Moha, Kalangi, Warongan, (2017)	& Sistem pengendalian intern Prinsip pengelolaan keuangan daerah.	pengaruh sistem pengendalian intern dan prinsip pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
3	Andini Yusrawati,(2015)	& Kompetensi sumber daya manusia Sistem akuntansi keuangan daerah.	Kompetensi sumberdaya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
	Mahardini Miranti, (2018)	& Standar akuntansi pemerintahan Kompetensi sumber daya manusia.	Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya
(Lanjutan)

No	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5	Darwanis & Mahyani, (2015)	Kapasitas sumber daya manusia Pemanfaatan teknologi informasi Pengendalian intern akuntansi.	Kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.
6	Putra, et al., (2017)	Kapasitas sumber daya manusia Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah Peran internal audit	Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Sumber : data penelitian terdahulu diolah, 2018

C. Perumusan Hipotesis

1. Kompetensi Sumberdaya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi menurut Spencer (1993) adalah suatu yang mendasari karakteristik dari suatu individu yang dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan. Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau

kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). *Stewardship theory* Donaldson dan Davis (1991) menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi.

Asumsi filosofi mengenai teori *stewardship* dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. Kemampuan sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam mencapai keberhasilan serta tujuan dalam sebuah organisasi. Dalam organisasi sektor publik sangat ditekankan pada kemampuan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sehingga organisasi sektor publik memiliki reputasi kinerja yang unggul serta akuntabel dipandangan masyarakat.

Penelitian Mahardini & Miranti (2018) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa semakin kompeten SDM menyajikan laporan keuangan, maka semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H.1 Kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. *Stewardship theory* menurut Donaldson dan Davis (1991) menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. *Stewardship theory* yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah, harus memuat komponen-komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi agar hasil outputnya lebih baik.

Pemakaian standar akuntansi ini cenderung dilakukan karena dapat memperbaiki sistem yang sudah dipergunakan sebelumnya, sehingga informasi keuangan sebagai bahan pengguna laporan keuangan menjadi lebih akurat dan kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat dihindarkan. Pemahaman standar akuntansi pemerintah yang baik akan menghasilkan kualitas yang handal dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan kata lain laporan keuangan yang relevan disebabkan karena

pemahaman yang baik akan berbasis akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan penyajian yang lengkap atas seluruh informasi.

Penelitian Mahardini & Miranti (2018) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa jika standar akuntansi pemerintah diterapkan dengan baik, maka akan semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem informasi akuntansi menurut Susanto (2004:124) dapat didefinisikan sebagai kumpulan subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan. *Stewardship theory* Donaldson dan Davis (1991) menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Asumsi filosofi mengenai teori *stewardship* dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus

menerapkan sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan sebagai bagian dari sistem informasi manajemen pemerintah daerah.

Putra, et al.,(2017) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi keuangan daerah positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa jika sistem informasi akuntansi diterapkan dengan baik, maka akan semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H3. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4. Penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menjelaskan sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. *Stewardship theory* menurut Donaldson dan Davis (1991) menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Asumsi filosofi mengenai teori *stewardship* dibangun berdasarkan sifat manusia

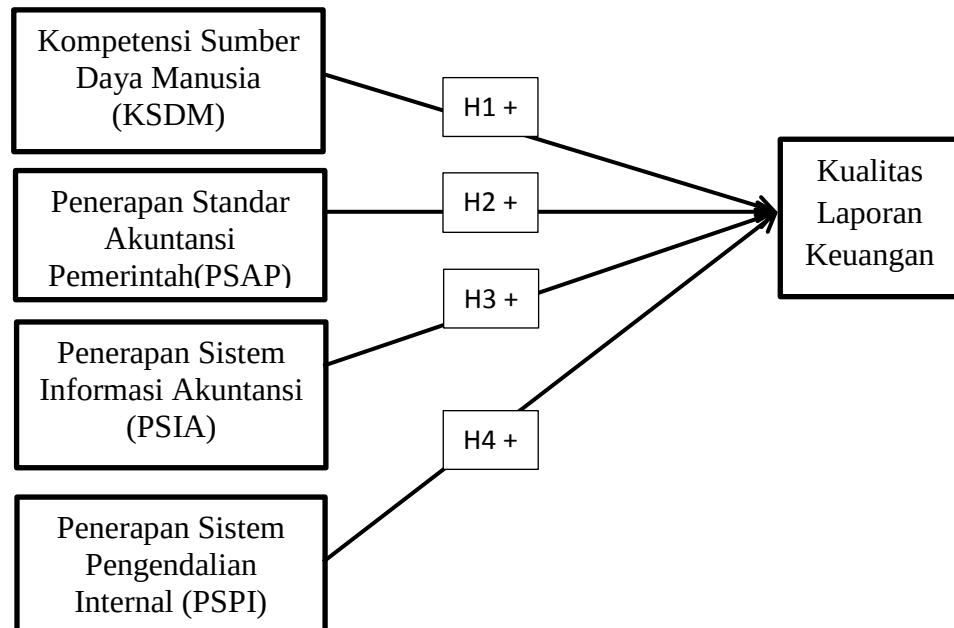
yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. *Stewardship theory* atau disebut juga teori pengabdian atau pelayanan merupakan teori yang didasarkan pada asas kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai *good steward* yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya secara penuh tanggung jawab.

Sistem pengendalian Internal memiliki peranan penting pada pencegahan kecurangan pelaporan keuangan dan mengurangi biaya yang signifikan pada kegiatan yang serupa. Keterlibatan fungsi Sistem pengendalian Internal maka, akan mengarahkan pada lingkungan yang lebih terkontrol dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga Sistem pengendalian Internal dalam penyusunan laporan keuangan akan meminimalisir kesalahan serta menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Stewardship theory yang menyatakan bahwa organisasi dicerminkan sebagai *good steward* yang melaksanakan tugas yang diberikan atasannya secara penuh tanggung jawab dan menyajikan keuangan yang berkualitas belum sepenuhnya diterapkan. Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Penelitian Moha et al., (2017) menemukan bahwa Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti dalam pengendalian internal berkaitan dengan strategi, aktivitas transaksi dan proses akhir pelaporan yang dilakukan pada setiap pemerintah daerah. Selain itu sistem pengendalian internal (SPI) juga merupakan salah satu tolok ukur yang harus dipantau agar antara perencanaan dengan hasil yang dihasilkan seimbang. Jika strategi yang telah ditentukan sesuai, maka SPI pada instansi pemerintah daerah yang dihasilkan baik. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H4. Penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

D. Model Penelitian

Gambar.2.1
Kerangka pikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang akan menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2001:55). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh OPD yang ada pada lingkungan Pemerintah Kota Salatiga. Sedangkan yang menjadi responden penelitian adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di OPD Pemerintah Kota Salatiga dan Pembantu PPK di OPD Pemerintah Kota Salatiga.

Menurut Sekaran (2006:123) sampel adalah sebagian dari populasi tersebut, sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel secara disengaja dengan kriteria sesuai dengan penelitian. Penilaian kriteria sampling meliputi:

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di OPD Pemerintah Kota Salatiga (Kepala Dinas, Kepala subbag keuangan, Staf keuangan).
- b. Memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan.
- c. Penelitian diambil hanya Badan dan Dinas di OPD Pemerintah Kota Salatiga, karena laporan lebih lengkap.

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah menggunakan data primer. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yang dimaksud dengan data primer menurut Sugiyono (2012:139) adalah data yang langsung diambil dari sumber asli tanpa adanya perantara yang didapat langsung dari responden. Data primer menjadi pilihan dalam mengumpulkan data karena data diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan pada aparatur pemerintah daerah seluruh manajerial OPD yang bekerja di lingkup Pemerintah Kota Salatiga yang terlibat dalam penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Kuesioner adalah satu set pernyataan yang tersusun secara sistematis dan standar sehingga pertanyaan yang sama dapat diajukan kepada setiap responden. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang efektif karena dapat diperolehnya data standar yang dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan analisis menyeluruh tentang karakteristik populasi yang diteliti Supranto (2000:21).

Kuesioner penelitian ini diserahkan langsung kepada responden atau meminta bantuan salah satu pegawai pada masing-masing OPD untuk mengkoordinir penyebaran dan pengumpulan kuesioner pada OPD tersebut. Kuesioner yang dibuat dalam bentuk dengan menggunakan skala Likert.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1
Variabel Kualitas Laporan Keuangan dan pengukuran variabel

No	Variabel	Definisi operasional	Indikator
1	Variabel Dependen a. Kualitas laporan keuangan	Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, Standar Akuntansi Pemerintahan (2010:245).	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami Menurut PP No 71 Tahun 2010 tentang SAP
2	Variabel Independen a. Kompetensi sumber daya manusia	kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai kharis (2010).	1. Pemahaman tentang akuntansi 2. SDM yang berkualitas 3. Sumber daya yang memadai 4. Peran dan tanggung jawab 5. Pelatihan keahlian dalam tugas 6. Sosialisasi peraturan baru 7. Pemahaman tentang struktur organisasi Menurut Huang, et al. (1999).
	b. Penerapan standar akuntansi pemerintah	Standar Akuntansi Pemerintahan menurut PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan	1. Identifikasi. 2. Pengklasifikasian. 3. Adanya sistem pengendalian untuk menjamin reabilitas.

Tabel 3.1
(Lanjutan)
Variabel Kualitas Laporan Keuangan dan pengukuran variabel

No	Variabel	Definisi operasional	Indikator
		Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.	4. Identifikasi. 5. Pengklasifikasian. 6. Adanya sistem pengendalian untuk menjamin reabilitas. 7. Menghitung masing-masing pengaruh operasi. Menurut Masisi (1978)
c.	Penerapan Sistem Informasi Akuntansi	Sistem informasi akuntansi menurut Susanto (2004:124) dapat didefinisikan sebagai kumpulan subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan.	1. Tingkat Kegunaan 2. Keefektifan biaya 3. Fleksibel Menurut Susanto (2004:124)
d.	Sistem pengendalian Internal	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menjelaskan sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai	1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan pengendalian

Tabel 3.1
(Lanjutan)
Variabel Kualitas Laporan Keuangan dan pengukuran variabel

No	Variabel	Definisi operasional	Indikator
		untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan dokumen/catatan Menurut PP No.60 Tahun 2008

D. Metode Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari *mean* (nilai rata-rata), standar deviasi, minimum dan maksimum Ghazali, (2013:19).

2. Pengujian Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid dan tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut Ghazali (2013:52). Menguji validitas instrumen kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). *Confirmatory Factor Analysis* digunakan untuk menguji apakah suatu variabel mempunyai unidimensionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah

variabel. Dengan analisis faktor konfirmatori dapat menguji apakah indikator benar-benar merupakan indikator dari variabel tersebut.

Analisis faktor konfirmatori akan mengelompokkan masing-masing indikator kedalam beberapa faktor apabila indikator yang digunakan merupakan indikator konstruk. Ketika pada pengelompokkan terdapat kesulitan dalam menginterpretasikan maka perlu dilakukan rotasi. Alat penting untuk interpretasi faktor adalah *factor rotation*. Rotasi ortogonal melakukan rotasi dengan sudut 90 derajat, sedangkan rotasi yang tidak 90 derajat disebut *oblique rotation*. Rotasi ortogonal dapat berbentuk *quartimax*, *varimax*, *equimax* dan *promax* Ghazali (2013:57).

Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Uji *Bartlett of Sphericity* merupakan uji statistik untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar sampel menyebabkan *Barlett test* semakin sensitif untuk mendeteksi adanya korelasi antara variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat *interkorelasi* antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus $> 0,50$ dan *cross loading* $> 0,50$ untuk dapat melakukan analisis faktor Ghazali, (2013:57).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji realibilitas dimaksud untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama Ghozali (2013:160).

Pengujian Ghozali (2013:160) reliabilitas dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan menghitung *croanbach's alpha* dari masing-masing instrument dalam suatu variabel. Instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan handal atau reliabel, jika memberikan nilai *croanbach's alpha* lebih dari 0,70 Ghozali (2013:160).

c. Analisis regresi linier berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel depende dengan suatu persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan dua tujuan sekaligus: pertama, meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada Ghozali

(2013:97). Penelitian ini untuk menguji keseluruhan hipotesis digunakan model regresi sebagai berikut:

$$KLK = \alpha + \beta_1 KSDM + \beta_2 PSAP + \beta_3 PSIA + \beta_4 PSPI + \varepsilon$$

Keterangan:

KLK	=	Kualitas laporan keuangan
KSDM	=	Kompetensi sumberdaya manusia
PSAP	=	Penerapan Standar akuntansi pemerintah
PSIA	=	Penerapan Sistem informasi akuntansi
PSPI	=	Penerapan Sistem Pengendalian Internal
α	=	Konstanta
β	=	Koefisien regresi independen
ε	=	Error

E. Pengujian Hipotesis

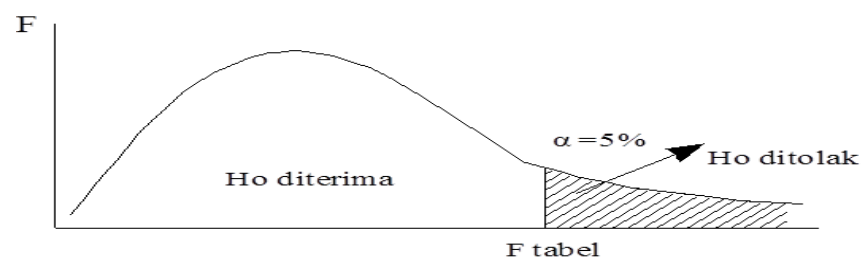
1. Koefisien Determinasi

Menurut Ghazali (2013:46) Koefisien determinasi R^2 untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi R^2 adalah antara nol sampai 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

2. Uji F

Menurut Ghozali (2013:98) uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*Goodness of fit*). Uji F menguji apakah variabel independen yang mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau menguji apakah model yang digunakan telah fit atau tidak Ghozali (2016:98). Menentukan F tabel dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% dengan derajat kebebasan pembilang (df) = k dan derajat kebebasan penyebut (df) = n - k - 1 dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan dengan kriteria:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $p\ value < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya model yang digunakan bagus (*fit*).
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau $p\ value > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima atau H_a tidak diterima, artinya model yang digunakan tidak bagus (*tidak fit*).

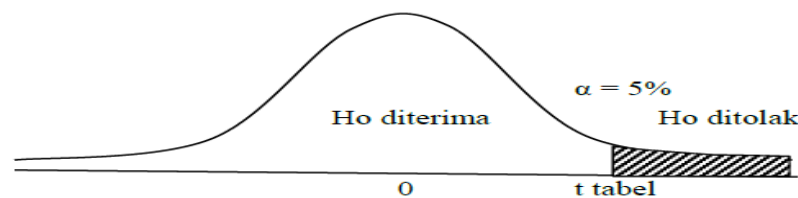


Gambar 3.1
Penerimaan Uji F

3. Uji t

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel penjelas atau independen dalam menerangkan variasi variabel dependen Ghazali (2013:98). Level of significant pada taraf $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan dinyatakan dalam $df=n-1$ yang merupakan uji satu sisi (*one tailed test*). Hipotesis positif:

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $p \text{ value} < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau $p \text{ value} > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima atau H_a tidak diterima, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Penerimaan Uji t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem informasi akuntansi, dan penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sampel yang diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 70 kuesioner yang dapat diolah.

Hasil Adjusted R Square menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem informasi akuntansi, dan penerapan sistem pengendalian internal mampu menjelaskan kualitas laporan keuangan 56,3 %, sedangkan sisanya 43,7% ($100\% - 56,3\% = 43,7\%$) dijelaskan oleh faktor-faktor lain dari luar penelitian ini. Hasil uji F menunjukkan model yang digunakan sudah bagus.

Hasil uji t menunjukkan bahwa Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Pengolahan data pada penelitian ini berdasarkan jawaban dari responden pada kuesioner yang disebarkan. Hal tersebut akan menimbulkan masalah jika persepsi responden berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Serta hasil penelitian ini hanya didasarkan pada data secara tertulis dari kuesioner.
2. Penelitian ini memiliki keterbatasan variabel, dimana variabel yang diteliti hanya Kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi informasi, dan penerapan sistem pengendalian internal. Sedangkan masih ada variabel lain yang perlu ditinjau kembali yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Penelitian ini memiliki keterbatasan kuesioner penerapan sistem informasi akuntansi yang dipakai tidak/ kurang mewakili variabel.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya selain menggunakan metode kuesioner, perlu adanya penambahan metode wawancara, supaya persepsi dari responden lebih sesuai dengan keadaan sebenarnya pada desa yang akan diteliti. Memperbaiki terlebih dahulu kuesioner yang digunakan dalam penelitian sehingga kuesioner yang akan digunakan selanjutnya memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi.

2. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti peran audit intern dan pemanfaatan teknologi informasi.
3. Penelitian Selanjutnya perlu mengganti kuesioner variabel Sistem Informasi Akuntansi yang sesuai/tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhimas Galih Hasmono . 2016. Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi atas Persepsi Para Pengelola Keuangan dan Akuntansi di Lingkungan SKPD Pemerintah Kabupaten Purworejo). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Surakarta.
- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2004. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol. 05 No. 02. Hal. 18-30.
- Andini, D., & Yusrawati. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akutansi*, 24(Juni 2015), 65–82.
- Armstrog, & M. 2009. *Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice*. London.
- Darwanis, & Mahyani, D. D. 2015. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Tehnologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 2(2), 65–66.
- Diani, Dian Irma. 2014. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman. Skripsi, *E-Journal Vol 2 No.1 Universitas Negeri Padang*.
- Donaldson. Lex, Davis James H. 19991. *Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Governance an d Shareholders Return*. *Australian Journal of Management*. Vol.16 iss.1.
- Fajar. (2012).” *Teori akuntansi sektor publik*”.<http://www.fajar.co.id>.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS* (3rd ed.). Semarang: Badan Penerbit Univrsitas Diponegro.

- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Edisi Ketujuh*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat: Jakarta
- Hanaffi, Ranny. 2017. Faktor - faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten pati). IAIN Surakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta : Gramedia.
- Juwita, Rukmi. 2013. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Trikonomika*. 12 (2): 201-214. ISSN:1411-514X.
- Kharis, Abdul. 2010. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada PT. Avia Avian. *Skripsi. Jawa Timur: UPN Veteran*.
- Krismiaji. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi. Edisi 3*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Mahardini, N. Y., & Miranti, A. 2018. *Dampak penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sdm pada kualitas laporan keuangan*, 5(1), 22–32.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Megawati., Ni Luh, G dan Sujana,E . (2015). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng).*e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha(Vol.3 No.1)*
- Moehirono. (2009). *Pengaruh Kinerja Berbasis Kompetensi*. Surabaya : Ghalia Indonesia.

- Moha, F., Kalangi, L., & Warongan, J. D. .2017. Pengaruh sistem pengendalian intern dan prinsip pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan,5(2), 1359–1370.
- Nurendah Ragillita U., & Moh Didik A. 2015. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan faktor eksternal sebagai pemoderasi (studi kasus pada pemerintah daerah Kabupaten Magelang)”. *Diponegoro Journal of Accounting*
- Nurillah, Syifa As 2014.Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Skripsi.Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Putra, D. K. A. D. S. A., Herawati, N. T., & Sulindawati, N. luh G. E. (2017). Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli. *E-Journal S1 AK*, 8(2).
- Republik Indonesia.*Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- _____.*Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*
- _____. *Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*.
- _____. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- _____.*Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*.
- Rivaldy Manimpurung., Lintje Kalangi., & Natalia Gerungai. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (bpkad) Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(2).
- Sekaran, U. 2006. *Research Methods for Business*. jakarta: Salemba Empat.

- Spencer, Lyle M. and Spencer, Signe M. 1993. *Competence at Work: Models for Superior Performance*. New York: John Wiley & Sons.
- Sugiyono. 20012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung.
- Susanto, Azhar. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi Konsep dan Pengembangan Berbasis Komputer*. Bandung: Lingga Jaya.
- Tawaqal, I., & Suparno. 2017. Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi , sistem pengendalian internal, dan kompetensi sdm terhadap kualitaslaporan keuangan satuan kerja perangkat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*.2(4), 125–135
- Wahyuni, Tri.(2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern dan Dukungan Manajemen Puncak terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (persepsi aparatur organisasi perangkat daerah kabupaten karanganyar). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wijaya, Lilis (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi empiris pada Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (dppkad) kabupaten sukoharjo). FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- www.bpk.go.id, 2017.

